

# Peran Sinyal Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Yudhi Prasetyo<sup>1</sup>

Shufia Zuhroh<sup>2</sup>

Novita Nugraheni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Indonesia

\*Correspondences: [yudhiprasetyo@ecampus.ut.ac.id](mailto:yudhiprasetyo@ecampus.ut.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan apakah alokasi APBD yang dibuat dan direncanakan oleh Pemda dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah terutama dalam hal kesejahteraan dan pembangunan Daerah. Populasi penelitian yaitu 34 provinsi di Indonesia dengan tahun 2019-2021. Penelitian menggunakan beberapa variabel independen yaitu kekayaan Daerah, ukuran Daerah, dan belanja modal untuk menguji hubungan pengaruhnya terhadap variabel dependen yang di proksikan dengan kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan alat uji statistik IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan Daerah, ukuran Daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: APBD; Kinerja Keuangan Daerah; Kekayaan Daerah; Ukuran Daerah; Belanja Modal

## *The Role of Financial Signals in the Regional Revenue and Expenditure Budget on Regional Government Performance*

### ABSTRACT

*This research aims to allocate the APBD made and planned by the Regional Government to improve the performance of the Regional Government, especially in terms of regional welfare and development. The research population is 34 provinces in Indonesia in 2019-2021. This study uses several independent variables, namely regional wealth, regional size, and capital spending to examine the relationship between the dependency variables proxied by local government performance. The study used quantitative methods with multiple regression analysis using the IBM SPSS 25 statistical test tool. The results showed that regional wealth, regional size, and spending capital had no effect on regional government performance.*

Keywords: APBD; Local Government Financial Performance; Regional Wealth; Local Government Size; Capital Expenditures

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 4  
Denpasar, 26 April 2023

Hal. 1116-1130

DOI:

10.24843/EJA.2023.v33.i04.p17

### PENGUTIPAN:

Prasetyo, Y., Zuhroh, S., & Nugraheni, N. (2023). Peran Sinyal Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 1116-1130

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
29 Desember 2022  
Artikel Diterima:  
26 April 2023

## PENDAHULUAN

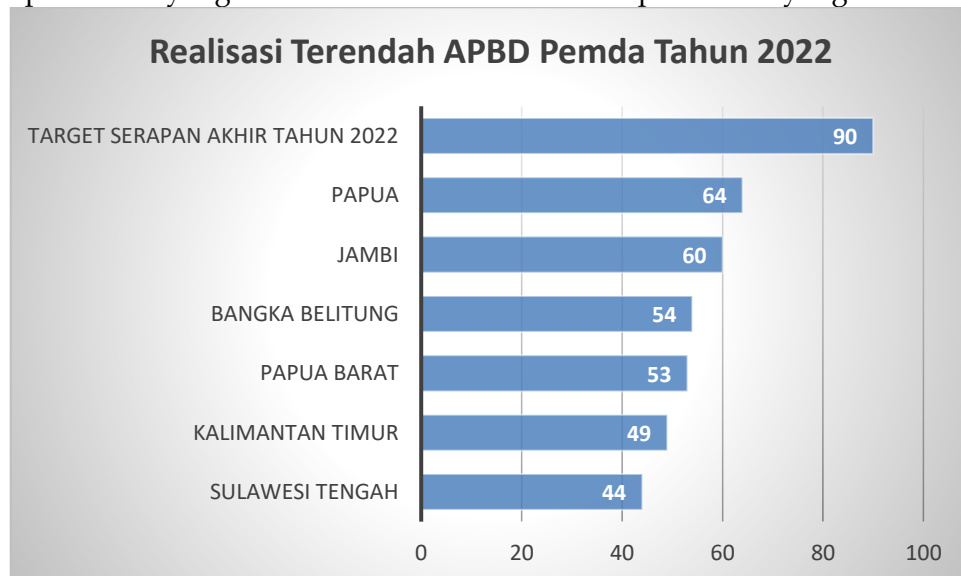
Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu indikator negara dapat menjadi berkembang dan meningkat dalam segi keuangan dan kesejahteraan baik dalam sektor pusat maupun Daerah. Menurut (Saputri, 2020), Indonesia telah memasuki perpindahan dalam artian arahan Pemerintah yang semulanya command and control dan saat ini menjadi hal yang berkepentingan pelayanan dan orientasi kedepan untuk memenuhi tuntutan publik dan yang pada akhirnya membentuk Pemerintahan yang bersifat otonom. Bersumber pada Hukum No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, serta penentuan peraturan oleh Pemerintah, wewenang yang dipunyai oleh penguasa wilayah adalah mengatur pemetaan wilayah, mencakup bermacam aktivitas pengelolaan yang melingkupi aktivitas pengaturan serta penilaian, dan pemograman penerapan serta aktivitas pengawasan (Rahmawati, 2019). Terdapatnya otonomi wilayah, penguasa wilayah memiliki wewenang pada mengatur serta menata sumberdaya yang ada dengan kemampuannya, dan mengurus sendiri hal Pemerintahnya. Wewenang atas peruntukan sumberdaya dengan cara mandiri mewajibkan penguasa wilayah menata informasi pengelolaan finansial yang baik dengan sesuai prinsip pengelolaan finansial wilayah, yang hendak dijadikan salah satu basis data pada penilaian kemampuan kinerja Pemerintah Daerah wilayah (Aminah *et al.*, 2019).

Menurut (Mardiasmo, 2011), salah satu pandangan yang berarti pada penerapan otonomi wilayah serta desentralisasi yang diatur dengan hati-hati merupakan permasalahan pengelolaan finansial wilayah serta perhitungan wilayah buat menciptakan otonomi wilayah serta desentralisasi yang besar, jelas, serta bertanggungjawab dibutuhkan manajemen finansial wilayah yang sanggup memantau serta menata kebijaksanaan finansial wilayah dengan cara murah, berdaya guna, efisien, transparansi, serta akuntabel. Keberhasilan otonomi area tidak terbebas dari daya penguasa area dalam menata keuangannya dengan cara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangn, mempunyai daya guna, ekonomis, efisien, transparansi dan bertanggung jawab. Evaluasi kemampuan pengelolaan finansial dicoba kepada APBD yang akan dipergunakan penguasa wilayah yang harus mengantarkan informasi pertanggungjawaban finansial Daerahnya untuk melihat apakah penguasa wilayah sukses melaksanakan tugasnya dengan bagus ataupun tidak (Harahap, 2020). Menurut (Ernawati, 2017), Keterkaitan dengan pemberian wewenang otonomi menuntut wilayah buat melakukan pembangunan diberbagai aspek, paling utama buat jasa serta pembangunan alat serta infrastruktur yang layak. Informasi APBD tiap wilayah dapat dijadikan ukuran pada cara pembangunan wilayah. Informasi itu bisa menolong warga memberikan evaluasi mengenai gimana kemampuan penguasa pada mengatur finansial Daerahnya, sudahkah pembagian pemasukan cocok dengan keinginan masyarakatnya ataupun belum (Aziz, 2016). Menurut Aulia & Rahmawaty,(2020), pengukuran kemampuan bisa dilaksanakan dengan memandang capaian yang diperoleh dari rentang waktu ke rentang waktu selanjutnya kemudian dibanding. Penerapkan perbandingan finansial kepada APBD, ialah perbandingan kemampuan, perbandingan efektifitas, perbandingan independensi serta perbandingan perkembangan merupakan satu dari banyak patokan yang dapat dipakai buat menjabarkan kemampuan finansial penguasa wilayah Mengenai menata finansial Daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah ialah basis penting pemasukan bagi wilayah otonom dari berbagai zona sektor seperti retribusi serta pajak wilayah, hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang bersifat legal (Saputri, 2020), (Abdullah & Asmawanti, 2015), dan (Darwanis, 2012). Salah satu penanda independensi sesuatu wilayah diukur melewati kenaikan Pemasukan Asli Wilayah tiap tahunnya oleh sebab itu, PAD mempunyai kedudukan yang berarti pada memastikan kemampuan finansial wilayah serta independensi wilayah (Liando, 2017).

Bedasarkan data yang didapatkan dari kementerian keuangan, di akhir Oktober 2022 anggaran Pemerintah (Pemda) yang mengendap di perbankan menggapai Rp278,73 triliun. Besarnya anggaran Pemda yang tersimpan dan mengendap di perbankan, hal ini disebabkan distribusi anggaran ke masing-masing wilayah Pemerintah Daerah yang tidak terealisasi dengan baik, kemudian dalam hal penyerapan anggaran berbelanja yang belum maksimal dikarenakan perencanaan yang tidak tepat pada awal penyusunan kegiatan belanja Daerah, sehingga dalam hal ini membuat realisasi kinerja Pemerintah Daerah yang di proksikan dengan keuangan menjadi tidak maksimal, mengakibatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan untuk masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Gambar 1 menunjukkan data yang didapatkan dalam katadata.co.id beberapa Daerah yang ada di Indonesia memiliki serapan APBD yang rendah.



**Gambar 1. Realisasi Terendah APBD Pemda Tahun 2022**

Sumber: katadata.co.id

Bedasarkan data diatas pada akhir tahun 2022 tepatnya di bulan Oktober beberapa Pemda di Indonesia masih terdapat kinerja Pemerintah Daerah yang belum maksimal dalam melakukan pendistribusian dana APBD yang dimilikinya terutama untuk wilayah indonesia bagian timur seperti papua, jika dilihat hal ini akan berpengaruh secara signifikansi terhadap kesejahteraan atau perputaran ekonomi yang terdapat di Daerah tersebut akan terganggu. Sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang akan diterima oleh para warga di

wilayah tersebut dan akan mengakibatkan kinerja Pemerintah dalam perputaran belanja yang dimilikinya akan buruk dalam serapan yang akan di capai.

Bedasarkan uraian dan penjelasan diatas, riset ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan realisasi APBD nya untuk perkembangan serta kemajuan Daerah tersebut. Sehingga memperlihatkan sejauh mana hasil kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya untuk pengembangan wilayah otonomnya, selain itu riset ini fokus dalam indikator tertentu seperti beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah seperti Kekayaan Daerah, Ukuran Daerah, dan Belanja Modal yang menjadi fokus dan perhatian dalam riset ini untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019-2021 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan variabel diatas dapat memberikan gambaran apakah faktor sinyal keuangan akan memberikan dampak terhadap realisasi baik atau buruknya kinerja Pemerintah Daerah serta memberikan gambaran apakah dengan keleluasaan dalam hal otonomi yang diberikan oleh rakyat sebagaimana diamanatkan melalui Undang-Undang memberikan akses yang lebih cepat dalam hal realisasi untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian Daerah. Hasil dari riset ini nantinya akan memberikan informasi baik secara teoritik ataupun praktik. Secara teoritik memberikan hasil implikasi apakah hasil riset akan mendukung teori yang ada, sehingga dapat munculnya sebuah kajian kajian teoritis baru, kemudian untuk kajian praktik dapat menjadi dasar refrensi bagi para regulator untuk bisa mengambil keputusan atau kebijakan dimasa yang akan datang.

Menurut Jensen, M., C., (1976), keagenan ialah semacam kesepakatan antara principal dan agen, berfokus dengan membagikan sebagian kewenangan pada agen untuk membuat sebuah keputusan dalam hal pelaksanaan Pemerintahan. Pada kelompok organisasi sektor publik, filosofi keagenan dapat dijalani di dalam Pemerintahan dengan tujuan utama bahwa, masyarakat dapat lebih mudah dan maju dalam hal akses perekonomian yang bersumber pada dalam kesepakatan antara principle dalam hal ini Pemerintah pusat sebagai pengendali utama perekonomian negara kepada Pemerintah Daerah sebagai agent pelaksana untuk mendukung serta membantu Pemerintah pusat dalam dalam hal pemerataan ekonomi dan pembangunan warga dan masyarakatnya di Daerah (Lane, 2000) dan (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Menurut (Verawaty, 2017), filosofi keagenan bisa diaplikasikan pada pelaksanaan Pemerintahan. Bentuk konsep hubungan antara agen dan prinsipal ialah kerangka analisis yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan permasalahan insentif pada institusi organisasi sektor publik dengan dua kemungkinan situasi, ialah ada sebagian prinsipal dengan tiap- tiap misi serta kebutuhan yang yang tidak koheren serta prinsipal pula dapat berperan tidak cocok dengan kebutuhan warga, namun mengutamakan kebutuhan yang karakternya lebih kecil. Hubungan keagenan pada penguasa dijalani bersumber pada peraturan penguasa wilayah serta bukan sekedar cuma buat penuhi kebutuhan prinsipal saja. Bila berhubungan dengan kemampuan finansial wilayah, penguasa pusat ialah prinsipal dimana penguasa pusat merupakan pihak yang berperan selaku donatur perintah serta bekerja buat memantau, membagikan evaluasi serta masukan atas kewajiban yang sudah dijalani oleh penguasa wilayah. Bila kemampuan finansial

wilayah yang diatur oleh penguasa wilayah bagus, daya sesuatu wilayah buat mengatur sumber- sumber finansial asli wilayah untukenuhi kebutuhannya pula hendak tercukupi serta tidak tergantung seluruhnya pada penguasa pusat (Verawaty *et al.*, 2020).

Bagi Zimmerman (1977), agency problem ini terdapat dalam seluruh tipe kelompok bagus itu zona sektor publik ataupun zona sektor privat. Di zona sektor privat terjalin antara stakeholders dengan manajemennya, sebaliknya di zona sektor publik biro dilema ini terjalin antara penguasa dengan orang (warga) dimana orang merupakan principal yang mendelegasikan wewenang serta penguasa selaku agen, buat mengatur Pemerintahannya pada bagan membagikan jasa pada warga (Aminahet *et al.*, 2019). Ilustrasinya keagenan pada Pemerintahan antara eksekutif serta legislatif. eksekutif selaku agen serta legislatif sebagai prinsipal (Fozzard, 2001). Antara eksekutif serta legislatif kerap terjadi bentrokan pada memastikan kebijaksanaan, kala mengutip sesuatu ketentuan keagenan. Sehingga dari itu, anggapan yang dicoba oleh (Lupia, 2000), melaporkan kalau permasalahan yang kerap dialami legislatif bisa dimaksud selaku kejadian fenomena yang dikatakan sebagai agency theory. Pada prinsip keagenan yang bagus, prinsipal ataupun agen kadangkala bersikap kurang etis. Keduanya kerap melaksanakan pelanggaran pada kontrak kegiatan serupa, ialah terdapatnya penyimpangan kala pada kategorisasi perhitungan buat penuhi kebutuhan prinsipal (Colombatto, 2001). Sedangkan bagi (Andvig *et al.*, 2001) para politisi memakai perhitungan buat kebutuhan pribadidan ataupun golongan.

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan *Financial* Wilayah melaporkan kalau kinerja ialah keluaran ataupun hasil dari program ataupun aktivitas yang hendak ataupun sudah digapai sehubungan dengan pemakaian perhitungan dengan jumlah serta mutu yang terukur (Saputri, 2020). Apabila besar output dibandingkan input, sehingga terus menjadi besar tingkatan efisiensi sesuatu kelompok (Andirfa, M., H. Basri, 2016). Sebaliknya Kemampuan Finansial Wilayah ialah tingkatan capaian dari sesuatu hasil kegiatan dibidang finansial wilayah dengan memakai penanda finansial yang sudah diresmikan lebih dahulu dengan misi buat mengenali daya sesuatu wilayah pada mengatur keuangannya (Wibawa *et al.*, 2017).

Pemasukan Asli Wilayah atau yang disebut sebagai PAD ialah pemasukan yang berasal dari kemampuan area yang dipungut cocok dengan peraturan Perundang- Undangan (Saputri, 2020). PAD selaku tulang punggung pada pembiayaan wilayah yang mempunyai kontribusi kepada APBD dengan uraian, pemasukan wilayah yang diperoleh sehingga kemampuan finansial Penguasa Wilayah dikira sanggup pada membuat Daerahnya sendiri serta bisa membolehkan wilayah itu pada penuhi keinginan aktivitas wilayah tanpa terkait dalam penguasa pusat. Pemasukan Asli Wilayah mempunyai kedudukan yang lumayan penting pada aktivitas operasional penguasa wilayah (Liando, 2017). Pemasukan Asli Wilayah (PAD) jadi aspek pendukung dari kemampuan ekonomi besar. Perkembangan yang positif mendesak kenaikan pemodalan alhasil dengan cara berbarengan pemodalan itu hendak mendesak kenaikan koreksi prasarana wilayah. Prasarana wilayah yang bagus serta diiringi pemodalan yang besar di sesuatu wilayah hendak menaikkan PAD Pemda itu (Mustikarini, 2012). Tingginya PAD sanggup meminimalkan ketergantungan wilayah kepada

dorongan pendanaan yang berasal dari pusat. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan hasil korelasi signifikan antara PAD dan kinerja Pemerintah Daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqinet *et al.*, 2021), (Apridiyanti, 2019), dan (Verawaty *et al.*, 2020) yang memberikan pendapat bahwa dengan PAD yang tinggi dapat mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer dana dari Pemerintah pusat sehingga realisasi kinerja Pemerintah Daerah menjadi lebih cepat. Dengan kajian teori serta penelitian terdahulu bahwa dapat disimpulkan untuk hipotesis pertama yaitu.

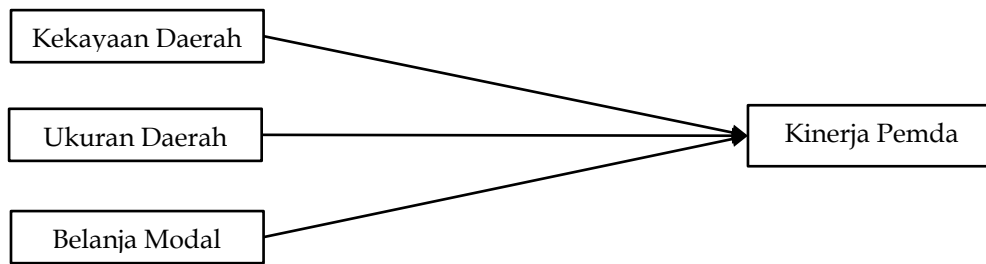
H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Semakin besar skala wilayah yang ditaksir menjadi besar keseluruhan total aset wilayah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut, sehingga terus menjadi besar juga kemampuan kinerja wilayah otonom yang dikuasainya (Kusumawardhani, 2012). apabila Pemerintah wilayah memiliki jumlah yang besar mungkin membatasi kemampuan sebab misalnya berbelanja yang sepatutnya dinikmati warga terlokasi buat perawatan aset yang cukup besar, sehingga banyaknya aset yang dimiliki dapat menghasilkan kemampuan birokrasi Pemerintahan yang kurang baik. Perihal yang lain dikatakan oleh (Marfiana, 2013) serta (Nugroho, 2018) baginya ukuran pemda yang diprosikan dengan besar kecilnya keseluruhan aset tidak membuktikan bagus atau tidaknya kemampuan Pemda, perihal ini sebab terdapat aspek kemampuan pada pengelolaan asetnya serta besarnya peninggalan yang dimiliki masing-masing Pemda nyatanya tidak menaikkan kemampuan pemda perihal ini diakibatkan sebab banyaknya peninggalan di pemda itu ialah peninggalan yang tidak bisa digunakan dengan cara produktif. Dengan kajian teori dan beberapa kajian peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua yaitu.

H<sub>2</sub>: Ukuran Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah diklaim kalau berbelanja modal merupakan pengeluaran buat akuisisi aset (aset konsisten ataupun aset yang lain) yang berguna lebih dari satu rentang waktu akuntansi (Nugraheni & Adi, 2020). Wilayah wajib mempersiapkan anggaran di awal periode waktu supaya pada rentang waktu tersebut pembangunan yang terdapat sudah cocok serta tidak membagikan kerugian pada wilayah sebab tiap kegiatan wilayah didasarkan dalam perhitungan yang sudah dianggarkan. Berbelanja modal yang dicoba oleh pemerintah wilayah bisa diamati dari gimana realisasi perhitungan itu dipakai. Salah satu fungsi dari belanja modal merupakan buat pembangunan infrastruktur, jadi berbelanja modal dikira berarti pada kegiatan ekonomi wilayah (Sedyaningsih, 2015). infrastruktur yang dibentuk diharapkan bisa menaikkan jasa pada warga wilayah (Darwanis, & Saputra, 2014). Dengan kajian teori dan beberapa kajian peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yaitu.

H<sub>3</sub>: Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran Riset**

Sumber: Data Penelitian, 2022

## METODE PENELITIAN

Riset merupakan ini wujud kuantitatif yang bermaksud buat menganalisa ikatan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, (Ghozali, 2018), variabel bebas yang digunakan dalam riset ini yaitu kekayaan Daerah yang diproksikan dalam bentuk PAD, ukuran Daerah yang diproksikan dengan keseluruhan aset yang dimiliki oleh pemda, serta belanja modal yang ada pada APBD, kemudian untuk variabel terikat dalam riset ini adalah kinerja Pemerintah Daerah.

Informasi serta data digabungkan dengan cara dokumentasi buat penentuan hal kondisi dan kenyataan yang berkaitan dengan fleksibel studi yang dicoba (Sugiyono, 2019). Data dan informasi yang diperlukan terdapat dalam data keuangan yang didapatkan pada informasi realisasi anggaran serta informasi finansial pemda yang terdapat di Badan Pust Statistik ataupun Kementerian Keuangan yang didapatkan secara online dengan mengakses website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

Populasi pada riset ini merupakan seluruh Pemerintah Daerah tingkat provinsi yang ada di Indonesia yang secara konsisten setiap tahun antara 2019-2021 sudah ada dalam nomenklatur Kesatuan Negara Republik Indonesia. Riset ini memakai informasi yang tersaji dalam data internal dan data publikasi dengan rentang waktu observasi 2019- 2021.

Tahapan pengujian data pada riset ini merupakan memakai pengujian statistik yang telah di komputasi pada excel. Selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu untuk melihat apakah data-data yang akan diuji regresi sudah terbebas dari masalah asumsi klasik. Berikut tahapan uji data statistik untuk riset ini . Pengujian Normalitas menggunakan one sample *kolmogorov-smirnov*. Dalam pengujian apabila hasil one sample *kolmogorov-smirnov* nilai signifikansi diatas 0,05 maka penyebaran data terdistribusi normal namun jika hasil signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal (Ghozali, 2018). Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser, untuk melihat apakah titik penyebaran data menyebar secara acak atau tidak, jika probabilitas data variabel independen yang tersebar menunjukkan signifikansi 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam bentuk model regresi (Ghozali, 2018). Pengujian Multikolinieritas dilakukan untuk memastikan apakah model regresi yang terbentuk ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas dan variabel independen, hal ini dilihat dari hasil pengujian apabila nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2018). Pengujian Autokorelasi dilakukan untuk melihat dan mendeteksi apakah terdapat hubungan

korelasi dalam nilai statistik data, uji menggunakan Run Test, apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi korelasi namun jika nilai kurang dari 0,05 maka terjadi korelasi (Ghozali, 2018). Pengujian Analisis Regresi Berganda untuk menguji secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan (Ghozali, 2018). Apabila signifikansi kurang dari 0.05 bahwa asumsi hipotesis diterima, apabila lebih dari 0.05 asumsi hipotesis ditolak.

Dalam riset ini difokuskan pada sebagian variabel yang dipakai ialah kekayaan Daerah yang diproksikan pada wujud PAD, skala ukuran Daerah yang diproksikan dengan keseluruhan aset pemda, serta belanja modal yang ada pada APBD kemudian akan diuji kepada variabel terikat, ialah kemampuan kinerja Pemerintah Daerah. Untuk operasionalisasi variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kinerja Pemda	$KP = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Skala Rasio
2	Kekayaan Daerah	$KD = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	Skala Rasio
3	Ukuran Daerah	Ukuran Daerah menggunakan logaritma natural total aset ( $\ln TA$ )	Skala Interval
4	Belanja Modal	$BM = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Skala Rasio

Sumber: Data Penelitian, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	34
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil riset diatas memastikan anggapan klasik normalitas memakai percobaan Kolmogorov Smirnov yang bisa diamati pada bagan diatas dalam bentuk regresi yang tercipta. Diarahkan dalam angka Sig. 2- tailed membuktikan nilai 0.200 yang berarti lebih dari 0,05 alhasil bentuk regresi yang dibangun pada penelitian ini dipenuhi pada percobaan pengujian asumsi klasik normalitas, perihal ini cocok dengan penjelasan yang di kemukakan oleh (Ghozali, 2018).

**Tabel 3. Hasil Pengujian Heterokedastisitas Glejser**

Model	t	Sig.
(Constant)	-0,489	0,628
Kekayaan Daerah	-0,944	0,353
Ukuran Daerah	0,738	0,466
Belanja Modal	0,702	0,488

Sumber: Data Penelitian, 2022



Bersumber pada hasil uji yang terlihat pada tabel 3 diatas kita bisa mengenali kalau hasil percobaan anggapan klasik buat melihat pertanda heterokedstisitas membuktikan angka dari tiap bentuk regresi yang dibangun pada studi ini yang diperlihatkan pada kolom tiap- tiap hasil signifikan lebih besar dari 0.05 alhasil perihal ini melaporkan tidak terdapat pertanda pada heterokedstisitas pada bentuk regresi ini alhasil bisa dibilang kalau hasil pengetestan sudah sesuai dengan filosofi yang dikemukakan oleh (Ghozali, 2018).

**Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kekayaan Daerah	0,609	1,642
Ukuran Daerah	0,654	1,529
Belanja Modal	0,915	1,093

Sumber: Data Penelitian, 2022

Bersumber pada tabel 4 diatas bisa dilihat bahwa hasil pengujian anggapan klasik multikolinearitas membuktikan angka tolerance lebih dari 0,1 serta angka VIF berdada di bawah nilai 10. Disajikan bahwa nilai tolerance yang dihasilkan oleh Kekayaan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Modal adalah 0.609; 0.654; 0.915 sedangkan untuk nilai VIF yang dihasilkan oleh Kekayaan Daerah, Ukuran Daerah dan Belanja Modal adalah 1.642; 1.529; 1.093. Bila diamati bentuk pada riset ini telahenuhi ketentuan pada anggapan klasik multikolinearitas. Sehingga data pengolahan yang dihasilkan sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan oleh (Ghozali, 2018).

**Tabel 5. Hasil Pengujain Autokorelasi Run Test**

	Unstandardized Residual
Total Cases	34
Asymp. Sig. (2-tailed)	0862

Sumber: Data Penelitian, 2022

Bersumber pada hasil uji output SPSS yang dicoba dan didapatkan data yang diperoleh serta diperlihatkan pada tabel 5 diatas diatas bisa diperhatikan bila angka Asymp. Sig (2- tailed) bentuk regresi ini yakni sebesar 0. 862 yang bisa disimpulkan kalau angka yang diperoleh lebih besar dari 0.05 alhasil bisa disimpulkan tidak ada kendala autokorelasi. Sehingga hasil yang diperoleh pada hasil uji anggapan klasik autokorelasi ini telah cocok dengan opini serta filosofi yang di informasikan oleh (Ghozali, 2018).

**Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	1010,726	37,902	26,666	0,000
KD	-0,021	0,024	-0,866	0,394
UD	-0,003	0,009	-0,282	0,780
BM	-0,001	0,088	-0,013	0,990

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda pada tabel di atas, diketahui bahwa pengujian tersebut berhubungan dengan pengaruh langsung satu arah dengan software IBM SPSS 25. Apabila kita buat menjadi persamaan regresi yang terebentuk dalam riset maka hasil adalah sebagai berikut.

$$Y = 0.000 + 0.394KD - 0.780UD - 0.990BM$$

Model regresi di atas menunjukkan bahwa variabel independen yang diindikasikan dengan kekayaan Daerah, ukuran Daerah dan belanja modal jika salah satu variabel independen berubah satu sama lain secara konsisten sehingga perubahan variabel dependen yang diindikasikan kinerja Pemerintah Daerah dengan sama dengan koefisien beta ( $\beta$ ) yang diturunkan dari nilai variabel independen tersebut.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kekayaan Daerah menunjukkan pengujian model penelitian yang didapatkan adalah 0,394 yang menunjukkan nilai yang signifikan dengan koefisien negatif yang tidak memenuhi persyaratan karena berada di atas standar yang ditetapkan lebih dari 0,05 sehingga asumsi hipotesis pertama dalam model regresi ini ditolak. Kemudian nilai ukuran Daerah yang tertera adalah sebesar 0,780 dengan arah koefisien menuju negatif dimana nilai tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai standar yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 0,05 sehingga asumsi hipotesis kedua ditolak. Selanjutnya variabel belanja modal menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,990 dengan arah koefisien negatif dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Pada hasil pengujian pertama yaitu kekayaan Daerah terhadap kinerja dari Pemerintah Daerah, dalam riset ini kekayaan Daerah yang diukur dari perbandingan antara realisasi belanja dengan pendapatan Daerah menunjukan hasil yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Apridiyanti, 2019) menyatakan bahwa jumlah dan kenaikan kontribusi yang dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan implikasi secara langsung yang sangat signifikan dalam kemandirian Pemerintah Daerah dalam melakukan kontribusinya untuk kemajuan Daerah dari segala penjurur untuk kemajuan Daerah yang dipimpinnya, hal ini dapat tercermin dan diinterpretasikan yang dapat dikatakan sebagai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan secara konsisten dari satu periode ke periode selanjutnya dalam tahun bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi harapan untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah pusat atas alokasi dana yang diberikan Pemerintah pusat untuk kemajuan Daerah tersebut, kemudian pendapat ini juga didukung dengan pendapat (Anjani, E. S. D., Akram, A., & Handajani, 2016) dalam riset yang dilakukannya seperti bahwasannya agar Pemerintah Daerah juga dapat dengan fleksibel menggunakan pendapatannya untuk membiayai kebutuhan atau belanja Daerahnya sendiri. Namun berdasarkan dalam penelitian yang dilakukan ini tidak sesuai dengan kajian dan pendapat tersebut hal ini menunjukkan semakin besar kekayaan Daerah ataupun tidak, tidak memberikan implikasi kinerja Pemerintah Daerah akan dipengaruhi ukuran daerah yang ada, karena indikator tersebut tidak menjadi acuan utama kemungkinan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Besar ataupun kecilnya tingkat kekayaan Daerah bukan menjadi tolak ukur berjalannya infrastruktur kemudian hal ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azhar, 2021) bahwa tingginya daya kemampuan Daerah atau wilayah otonom dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli Daerahnya, maka tidak akan memberikan efek yang tinggi pula atas tindakan dan keputusan untuk menggunakan dan merealisasikan pendapatan asli Daerah tersebut yang telah dipetakan dan direncanakan dengan

kebutuhan dan pembangunan Daerah. Secara teoritis yang pernah disampaikan oleh (Mardiasmo, 2011) dalam bukunya untuk akuntansi sektor publik bahwa berdasarkan tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah salah satunya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam memberi pelayanan publik, jika dikaitkan dengan hasil riset penelitian ini Pemerintah tingkat provinsi di Indonesia atas kebijakan yang diambil belum maksimal dalam memaksimalkan PAD untuk kemajuan Daerahnya. Sehingga penelitian ini bertentangan dengan hasil yang dikemukakan oleh (Taufik Dasmawati, Yesi Mutia Basri, 2020), (Verawaty *et al.*, 2020), dan (Muttaqinet *et al.*, 2021) yang menemukan adanya keterkaitan pengaruh antara kekayaan Daerah dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua bahwa ukuran Daerah yang diindikasikan dengan total aset keseluruhan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah memberikan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Total aset yang besar memberikan potensi yang lebih besar dalam memajukan daerahnya, namun dalam hasil riset yang dihasilkan ini tidak, bahwa semakin besar total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Indonesia, semakin rendah kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik guna meningkatkan kesejahteraan Daerahnya (Rahmawati, 2019). Mayoritas aset yang dimiliki Pemerintah Daerah merupakan aset yang kurang produktif serta menimbulkan implikasi yang signifikan pada menaikkan kinerja Pemerintah Daerah. Perihal itu diakibatkan bukan cuma sebab jumlah aset yang besar, tetapi manajemen basis sumber daya manusia Pemerintah Daerah di Provinsi yang terdapat di Indonesia pula wajib dapat menggunakan serta mengatur aset yang dimiliki tersebut agar memberikan efek pemasukan yang efektif serta efisien untuk Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan kesejahteraan ekonominya (Nugroho, 2018). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Millenia, 2022) dan (Natariasari *et al.*, 2015) yang mengungkapkan bahwa ukuran Daerah yang diindikasikan oleh jumlah aset yang dimilikinya besar dapat membantu dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang akan meningkatkan kinerja dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan salah satu faktornya adalah karena Pemerintah Daerah dengan total ukuran aset yang sangat besar memiliki tekanan pula yang sangat besar untuk melakukan pengungkapan dan penyajian atas laporan keuangan yang dilaporkannya. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran aset yang besar akan dituntut untuk melakukan kinerja yang lebih baik dalam hal pengurusan wilayah kekuasaannya dibandingkan Pemerintah Daerah yang kecil ukurannya yang tidak terlalu signifikan. Sehingga penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hadi & Setiawan, 2020), dan (Alviniet *et al.*, 2018) yang menemukan keterkaitan hubungan yang signifikan antara ukuran Daerah dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga bahwa belanja modal dalam pengujian riset ini tidak memberikan efek keterkaitan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dihasilkan dalam riset yang dilakukan oleh (Dasmal & Basri, 2020) jika diketahui bahwa anggaran pendapatan belanja Daerah yang disusun memiliki tujuan yang besar yakni memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta untuk wilayah otonom tersebut. Apabila alokasi dana APBD lebih besar pada alokasi untuk operasional Pemerintah Daerah sendiri, maka pembangun infrastruktur tidak akan terjadi signifikan dan mengakibatkan kinerja dari Pemerintah otonom tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal. Dengan kata lain bahwa belanja modal yang berimplikasi negatif akan berpengaruh dalam Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan pembanguna wilayah untuk memberikan pelayanan publik yang baik sehingga respon yang dihasilkan oleh masyarakat pun juga tidak sesuai dengan ekspektasi pada umumnya dalam teori agensi yang dikaitkan dalam akuntansi dan manajemen sektor publik. Sehingga penelitian ini pun tidak sejalan dengan pendapat dan hasil yang dikemukakan oleh (Saputri, 2020), (Nugroho, 2012), (Leki & Naukoko, 2018), (Angelinaet al., 2020), (Andirfa, 2016) dan (Lathifa, 2019) yang menemukan adanya keterkaitan pengaruh yang signifikan antara belanja modal dengan kinerja Pemerintah Daerah yang dihasilkan untuk para warga wilayah otonom.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan didasarkan oleh kajian teoritis serta penelitian terdahulu yang dilaksanakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan Daerah, ukuran Daerah dan belanja modal dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi di Indoensia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel dalam pengujian terhadap kinerja Pemerinatah Daerah, sehingga hasil yang didapatkan belum cukup bervariasi. Kemudian untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan lagi untuk penggunaan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah kemudian untuk kajian teori dapat ditambahkan lagi seperti yang terjadi terhadap sektor pemerintaahan yang ada dinegara lain, sehingga dapat menjadi pembanding serta perkuat hasil analisis data.

#### REFERENSI

- Aafiah Millenia, N. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786-803. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.448>
- Abdullah, Asmawanti, D., & F. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansiuntansi*, 3(1), 41-67.
- Alvini, Y., Basri, M. Y., & Hasan, M. A. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Feb*, 1(1), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/21643/20941>

- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.137>
- Andirfa, M., H. Basri, dan M. S. A. M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30-38.
- Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, T. S. & T., & Søreide. (2001). Research on Corruption. A Policy Oriented Survey. *Poverty and Corruption in South Africa: Government Corruption in Poverty Alleviation Programs*.
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4(1).
- Anjani, E. S. D., Akram, A., & Handajani, L. (2016). Hubungan Pad, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat. *InFestasi*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V11I1.1121>
- Anugrah Hadi, D., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2099-2114. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.200>
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32-41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584-598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164-174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur ). *EKSIS Universitas Islam Majapahit Mojokerto. ISSN: 1907-7513*, 11(1).
- Colombatto, E. (2001). Discretionary power, rent-seeking and corruption. University di Torino & ICER. In *working paper*. University Torino & ICER.
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183-199.
- Ernawati. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

- Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 1(1), 1-24.
- Fajar Nugroho, A. R. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1-14.
- Fozzard, A. (2001). The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure. *Overseas Development Institute (ODI)*, Working paper 147.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit-Undip.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Jensen, M., C., dan W. M. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Julitawati, E., Darwanis, J. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 1(1), 15-29.
- Kusumawardhani. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*.
- Lane, J. E. (2000). *New Public Management*.
- Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1-10.
- Leki, Y., & Amran T. Naukoko, J. I. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164-174.
- Liando, I. I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Flypaper Effect dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Lupia, A. & M. M. (2000). NoRepresentation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research*, 37, 291-307.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marfiana, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Mulia Andirfa, H. B. M. S. A. M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30-38.
- Mustikarini, W. A. dan D. F. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012*, 1-23.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Natariasari, R., Yusrarlaini, Y., & Maiyora, G. (2015). *engaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Studi Empiris Kabupaten/kota di Pulau Sumatera*. Universitas Riau.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19-42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1-16.
- Saputri, S. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *Riset Dan Akuntansi*, 1999(23), 452-459.
- Sedyaningsih, P. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2012). *Universitas Brawijaya, Akuntansi. Malang*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Taufik Dasmawati, Yesi Mutia Basri, N. I. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2(16), 39-57.
- Verawaty. (2017). The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia. *World Review of Business Research*, 4(2), 176-195.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21-37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wibawa, D.T., Hasbudin., Ruslin., dan T. D. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Opini Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember, 27-30 September*, 1-36.
- Zimmerman, L. J. (1977). The Municipal Accounting Maze : An analysis of political incentives. *Journal Accounting Research*, 15, 107-144.